

USAHA JEPANG DALAM PENYELESAIAN KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA TAHUN 1963-1966

Adi Sanjaya, Syaiful M dan Yustina Sri Ekwandari

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail: adisanjaya285@gmail.com.

HP. 085783545199

The purpose of this study to determine the Japan Business in Indonesia-Malaysia Confrontation Settlement Year 1963-1966. The method used in this research is the method of Historical. The data collection technique is a technique of literature and documentation, while using qualitative data analysis techniques. Results from this study that the Japanese effort in the completion of the Indonesia-Malaysia confrontation, namely, Japan as a mediator in the settlement of the Indonesia-Malaysia confrontation, Japan formed a group of four countries in the settlement commission Indonesia-Malaysia Confrontation, Japan help the Indonesian economy by giving loans and investments, and delay repayment Indonesia to Japan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Usaha Jepang dalam Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Historis. Teknik pengumpulan data adalah teknik kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa usaha Jepang dalam penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia yaitu, Jepang sebagai mediator dalam penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Jepang membentuk kelompok komisi empat negara dalam penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Jepang membantu perekonomian Indonesia dengan memberikan pinjaman kredit dan investasi serta menunda pembayaran hutang Indonesia terhadap Jepang.

Kata kunci: mediator, penyelesaian konfrontasi, usaha jepang

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia mulai berganti pemerintahan ketika dikeluarkannya “Dekret Presiden Kabinet Juanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959, digantikan dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden Soekarno bertindak selaku perdana menteri. Dengan ini pemerintahan dikendalikan oleh satu komando dibawah presiden, perubahan didalam dasar negara yaitu UUD 1945 berubah ke NASAKOM. Berdampak pada perubahan politik luar negeri Indonesia seperti yang dikemukakan dalam pidatonya: “Politik luar negeri “konfrontasi” Presiden Soekarno dalam memecahkan masalah Irian Barat dan kemudian dengan sengketa Malaysia” (Yahya A. Muhaimin, 1982: 146).

Langkah yang ambil oleh Soekarno dalam mewujudkan politik luar negerinya. Seperti pidato yang di sampaikan oleh Soekarno dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960 isinya

“kepada kepala negara seluruh dunia baru merdeka atau sedang berkembang untuk bersama-sama bersatu dalam perjuangan “membina kembali dunia ini”, menjadi suatu dunia dimana negara-negara yang baru sedang berkembang akan mendapatkan dan memiliki kedudukan yang sama-sama terhormat dan setara di dunia PBB dan di dalam menikmati kesejahteraan sesama bangsa di dunia” (Yahya A. Muhaimin, 1982: 146).

Keinginan Soekarno setiap negara berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa dibawah tekanan dari

negara lain. Berbeda dengan rencana pendirian Federasi Malaysia, Soekarno merasa Rahaman telah melanggar yang telah disepakati bersama. Awal ketidaksetujuan ini ketika

“Tengku Abdul Rachman mengumumkan bahwa Federasi Malaysia akan diresmikan pada tanggal 16 September 1963. Keputusan sepihak yang mengabaikan Kesepakatan Manila tentu melukai Soekarno dan Mancapagal, presiden Philipina” (Darmawan, 2008: 82).

Mendengar kabar tersebut pihak Indonesia khususnya Soekarno bereaksi negatif dengan alasan bahwa Federasi Malaysia merupakan sebuah bentukan baru dari Neokolonisasi (Neokolim) dan melanggar kesepakatan Manila. Keinginan Indonesia untuk mengakui Federasi Malaysia, maka terjadilah konfrontasi ini yang melibatkan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Philipina sedangkan ketiga negara tersebut dikenal dengan nama MALPHILINDO.

Konfrontasi terus berlanjut menuju arah peperangan yang dampaknya bisa dirasakan oleh semua negara Asia Tenggara serta negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut, seperti Inggris, Amerika dan Jepang. Untuk menghentikan konfrontasi Indonesia-Malaysia maka Jepang harus melakukan suatu cara. Gagasan yang diambil Jepang untuk ikut terlibat dalam menengahi konflik ini yaitu Ikeda Hayato. Apabila konfrontasi ini terus berlanjut maka aktivitas dikawasan Asia Tenggara dapat terganggu seperti jalur

perlintasan kapal perniagaan atau perdagangan. Seperti di dalam buku karangan Masashi Nishihara yaitu

“Sebuah negara Asia nonkomunis akan dapat membantu melindungi aktivitas perdagangan Jepang dari kompetisi yang mungkin terjadi dengan Republik Rakyat Cina, yang bermaksud untuk memasarkan barang-barangnya sendiri di Asia Tenggara. Selain itu, sebuah negara Asia Tenggara nonkomunis juga akan melindungi keamanan rute minyak Jepang yang sudah disebutkan tadi dari Timur Tengah. Akhirnya, memperkuat Asia melawan komunisme berarti sesuai dengan kebijakan Jepang dalam dalam kerjasama dengan Washington”(Masashi Nishihara, 1993: 15).

Begitu pula Jepang yang merupakan bagian dari aliansi Amerika untuk menghentikan pergerakan komunis di kawasan Pasifik baik itu dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Uni Soviet (US). Langkah-langkah Jepang dalam peroleh dukungan seperti yang tertulis dalam buku karangan Lie Tek Tjeng yaitu “mendapat restu negara-negara barat, khususnya AS, karena hal ini mengandung kemungkinan, pengepungan RRT kiranya dapat dilaksanakan oleh negara-negara Asia sendiri, yaitu: Jepang, MAPHILINDO dengan Indonesia sebagai intinya dan India” (Lie Tek Tjeng, 1983: 365). Jadi Jepang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara beserta membendung perkembangan komunis di Asia Tenggara itu salah

satu keharusan yang wajib dilakukan oleh Jepang.

Jepang mulai mengadakan perjanjian damai antara Jepang dengan negara bekas jajahan di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Myanmar, Philipina dan Vietnam Selatan. Perjanjian damai ini dilakukan Jepang dengan membayar pampasan perang kepada bekas jajahan khususnya pemerintahan Indonesia. Seperti yang dikatakan Masashi Nishihara dalam bukunya: “Sesuai dengan perjanjian pampasan, Jepang sepakat untuk membayar \$20 juta setiap tahun selama sebelas tahun pertama dan \$3,08 juta pada tahun kedua-belas” (Masashi Nishihara, 1993: 112). Pembayaran pampasan perang ini diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 1958. Keterlibatan Jepang dalam konfrontasi menuai banyak reaksi dari beberapa kalangan baik dari pihak Indonesia dan Malaysia.

Jepang melihat bahwa dalam menengahi permasalahan tersebut merupakan langkah awal untuk mendekati kembali dengan negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Dalam masalah ini Jepang menawarkan diri sebagai mediator. Dalam menengahi konfrontasi ini Jepang selaku mediator berusaha untuk mempertemukan kedua belah pihak dengan cara pemerintah Jepang melakukan hubungan diplomasi dengan mengirim utusannya ke Indonesia dan Malaysia. Utusan pemerintahan Jepang ini untuk menemui para pemimpin negara tersebut. Untuk membicarakan agar mempercepat tentang penyelesaian sengketa tersebut. Pemerintah Jepang mengirim utusannya tidak hanya satu kali melainkan beberapa kali, hal ini disebabkan adanya kesulitan untuk mempertemukan para pimpinan

tersebut. Dalam mempertemukan mereka Jepang memfasilitasi tempat bertemunya para pemimpin negara tersebut.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang usaha Jepang dalam penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966.

METODE PENELITIAN

Menurut Mardalis, Metode adalah suatu cara atau tehnik dalam proses penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis, 2004: 24).

Menurut Hadari Nawawi Metode historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu, untuk kemudian hasilnya juga dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang (Hadari Nawawi, 1993: 78-79). Menurut Nugroho Notosusanto:

Metode Historis adalah perkumpulan prinsip-prinsip aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya (Nugroho Notosusanto, 1964: 11).

Dalam proses Metode Historis ini peneliti mendapat berbagai sumber-sumber serta bukti-bukti yang relevan yang di dapat dengan

melalui pencarian, penulisan, perangkuman suatu cerita peristiwa yang peneliti peroleh dari Perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI. Demi memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun langkah langkah dalam penulisan historis yaitu :

1. Heuristik yaitu kegiatan menghimpun jejak masa lampau.
2. Kritik yaitu penyelidikan tentang kesejatan jejak, baik bentuk maupun isinya.
3. Interpretasi yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dan fakta-fakta yang diperoleh.
4. Historiografi yaitu menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk kisah (Nugroho Notosusanto, 1983: 36).

Menurut Sofian Effendi, variabel penelitian agar konsep tersebut dapat diteliti secara empiris, maka mereka harus dioprasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel yang berarti sesuatu yang memiliki nilai bervariasi (Sofian Effendi, 1998: 97). Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka variabel adalah suatu konsep yang digunakan oleh peneliti menuntukan objek yang akan diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada Usaha Jepang dalam penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966.

Untuk memperoleh data maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : teknik kepastakaan dan teknik dokumentasi.

Menurut Joko Subagyo, teknik kepustakaan adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah (Joko Subagyo, 1997: 109). Menurut Koentjaraningrat, studi pustaka adalah suatu cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang dapat diruangan perpustakaan misalnya koran, catatan-catatan, kisah-kisah sejarah, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1997:8).

Koentjaraningrat yang dimaksud teknik dokumentasi yaitu suatu metode atau acara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku, dalil-dalil, atau hukum-hukum, dan lain lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Koentjaraningrat, 1989: 188). Berdasarkan pengertian di atas bahwa dalam penelitian perlunya ada teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan teknik perpustakaan untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel.

Dibawah ini merupakan tahap-tahap dalam proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian atau *display* data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, *display* data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

3. Verifikasi data

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya) (Camp Counseling, 6 Juni 2013:1).

Dalam penelitian ini, makaproses analisis data kualitatif dapat disimpulkan menjadi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Rencana awal pembentukan negara Malaysia itu tidak ada masalah, negara lain pun mendukung termasuk negara Indonesia sendiri. Dukungan yang diberikandalam pembentukan negara Malaysia sangatlah banyak sseperti Thailand dan Filipina. Adanya dukungan ini hubungan antar tiga negara ini sangatlah dekat dan erat.Keinginan Tunku Abdur Rahman mulai terrealisasikan dengan mendapatkan dukungan dari Inggris.

Pembentukannegara Federasi Malaysia diprakarsai Oleh ImperialisInggris.Penggabungansemenanjung Tanah Melayudengan Sabah dan Serawak dari satu sisi pengakukan rakyat Sabah dan Serawak terus dalam belenggupenjajahan, sedangkan mereka sangat mendambakan kemerdekaan” (John B. Srijanto, 2010: 28).

Dengan dapatnya dukungan ini Rahman begitu besar untuk menyatukan Tanah Melayu menjadi sebuah negara merdeka.Akan tetapi tanggapan Indonesia sendiri pandangan berbeda, khususnya Soekarno menganggap ini perbuatan yang melanggar aturan. “Pembentukan Federasi itu harus melalui proses pemungutan pendapat rakyat setempat (John B. Srijanto, 2010,28)”, akan tetapiRahman tidak melakukan tindakan tersebut.

Tindakan yang dilakukan Rahman merupakan tindakan yang jauh dari kesepakatan yang telah dibuat oleh mereka sebelumnya.Soekarno melihat hal ini ada maksud lain dalam pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia dan Filipina akan setuju dengan syarat harus melalui pemungutan suara rakyat yang dilakukan oleh PBB.

Indonesia dan Filipina akanmengawasi proses penyelidikan terlebih dahulu dan dilaksanakan Michelmour. Penyelidikan tersebut belum selesainya dari pihak Malaysia telah melanggar *Manila Agreement*.Penyelidikan belum sepenuhnya dijalankan, berdasarkan *Manila Agreement* dan terealisasikan secara kesepatan.

“ketika tim PBB baru berangkat ke Sabah, secara tak terduga, pada tanggal 29 Agustus 1963 Tengku Abdur Rahman mrngumumkan bahwa Federasi Malaysia akan diresmikan pada tanggal 16 September 1963.keputusan yang mengabaikan kesepakatan Manila tentu melukai hati Sukarno dan Mancapagal, presiden Filipina”(Darmawan, 2008: 82).

Berdasarkan pengumuman sepihak yang dilakukan oleh Rahman, menyebabkan memanasnya kembali antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Keterlibatan Jepang dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966

Jepang merasa beruntung bisa berdekatan dengan kedua negara besar kawasan AsiaTenggara ini.Hal ini disebabkan masalah penyelesaian

pampasan perang terhadap Indonesia yang dimulai pada tahun 1958-1970. Dengan ini pihak Jepang bisa memberikan pengaruh terhadap Indonesia dengan Malaysia. Ikeda merasa berkewajiban untuk ikut campur dengan masalah yang terjadi diantara dua negara tersebut, ini merupakan sebuah tugas bagi Jepang karena pada waktu itu kedudukan Jepang sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB. Jepang memiliki kewajiban untuk mendamaikan berbagai permasalahan yang terjadi di dunia termasuk masalah konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Jepang mulai pergerakan dalam mendekati dan masuk dalam masalah konfrontasi ini, meski dalam perjalannya Jepang harus berhati-hati dalam menjalankan perannya sebagai mediator diantara kedua belah pihak. Hal ini merupakan disebabkan awal Jepang dalam dunia politik dikawasan Asia Tenggara supaya politik Jepang bisa diterima dan tidak dianggap berbahaya oleh negara-negara Asia Tenggara tersebut.

Usaha Jepang yang dilakukan dalam mediasi dengan pihak Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966

1. Lobi Ohira Masayoshi

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang penuh hati-hati yang diambil oleh pemerintahan Jepang. Lantaran sikap ini bisa merusak jalinan dan hubungan dengan negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara, hubungan ini baru terjalin kembali setelah terjadinya pembayaran pampasan perang oleh Jepang.

Menurut "Menteri Luar Negeri Jepang, Ohira Masayoshi, mendesak

Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, yang sedang berkunjung pada 24 Mei 1963 untuk mengundang Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman, agar menemui presiden Soekarno di Tokyo dan menawarkan kepada mereka, suatu tempat khusus perbincangan" (Masashi Nishihara, 1993: 174).

Dengan usulan Jepang tersebut Subandrio menyetujuinya dan akan menghubungi Perdana Menteri Malaysia tersebut. Subandrio pula mengubungi Presiden Indonesia yaitu Soekarno agar dapat berkunjung ke Tokyo, untuk membahas konflik konfrontasi antara Indonesia-Malaysia. Begitu juga dari pihak Malaysia mereka menanyakan maksud dan tujuan undangan tersebut. Subandrio mengungkapkan bahwa pihak Jepang memintanya untuk memanggil pihak Indonesia-Malaysia yang berselisih untuk bertemu di Tokyo atas usulan Menteri Luar Negeri Jepang. "Pada tanggal 31 Mei 1963 Perdana Menteri Malaysia berangkat ke Tokyo dan menjumpai presiden Soekarno" (Masashi Nishihara, 1993: 174).

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan bahwa kedua negara akan melakukan pertemuan kembali dengan mengundang negara tetangga yaitu Filipina untuk berunding dalam menyelesaikan konfrontasi tersebut. kedudukan Jepang dalam perundingan ini sebagai fasilitator untuk mempertemukan kedua pemimpin kedua negara. Dalam pertemuan kedua dihadiri Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk membahas pembentukan Federasi Malaysia. Hasil pertemuan ini ketiga

negara meyepakati untuk membentuk Federasi Malaysia dengan kesepakatan harus melalui PBB, sedangkan kelompok ini dikenal dengan MAPHILINDO. Jepang menyerahkan perundingan selanjut kepada ketiga pemimpin tersebut.

2. Lobi Ikeda Hayato

Perundingan Ikeda merupakan perundingan kelanjutan dari lobi yang telah dilakukan oleh pihak Ohiro. Dalam perundingan ini, Ikeda memiliki suatu pandangan tersendiri tentang masalah konfrontasi Indonesia-Malaysia yaitu:

- a. bahwa baik Amerika Serikat maupun Inggris Raya sama-sama tidak melakukan tekanan terhadap Indonesia dan Malaysia.
- b. perselisihan antar pemimpin Indonesia, Malaysia dan Filipina lebih bersifat emosional dari pada politis.
- c. pada tanggal 19 September ketika Subandrio singgah ke Tokyo dalam perjalanan ke New York, dia dapat kesan dari Oda, bahwa Indonesia akan menghargai mediasi Jepang.
- d. kepentingan Jepang untuk mencegah agar masalah Malaysia tidak berkembang menjadi suatu konflik timur-barat yang total
- e. Asia Tenggara yang stabil akan menjamin ekspor barang-barang Jepang secara kesinambungan ke kawasan tersebut. (Masashi Nishihara, 1993: 176).

Dengan lima alasan tersebut Ikeda benar-benar serius untuk menjadi mediator kedua belah pihak yang berkonfrontasi yaitu Indonesia-Malaysia. Untuk memuluskan rencana yang dimiliki Ikeda maka dia harus datang ke Indonesia

Sebagai langkah awal usaha untuk menyelesaikan konfrontasi. “Ikeda melakukan kunjungan ke Jakarta pada tanggal 26-29 September 1963 jauh sukses dari pada kunjungan ke Manila” (S. Ichimura, 1967: 70).

Kunjungan Ikeda ke Indonesia menyepakati bahwa Indonesia dan Jepang memiliki hubungan dekat, Jepang bersedia memberikan pinjaman dan penundaan bayar hutang Indonesia atas Jepang, Jepang meminta menurunkan bendera Indonesia di Kedutaan Inggris, dan penyelesaian Konfrontasi Malaysia dilakukan secara perundingan (kekeluargaan).

Ikeda pun melakukan mediasi kembali dengan Soekarno untuk masalah Malaysia. “Pada 15 Januari 1964, Presiden Soekarno datang ke Jepang dalam salah satu lawatan informalnya yang sering, yang bertepatan dengan satu kunjungan oleh Jaksa Agung Amerika Serikat waktu itu, Robert Kennedy” (Masashi Nishihara, 1993: 178).

Dalam kesempatan ini Ikeda bertemu Soekarno untuk mengingatkan tidak melanjutkan konfrontasi dan serangan ke Serawak dan Sabah. Saran yang diberikan oleh Ikeda kepada Soekarno tidak dianggapi. Hal ini dilihat dari aksi-aksi yang kedua negara tersebut semakin mengarah ke arah perang, banyak tentara dan relawan dikirim ke wilayah Sabah dan Serawak. Bahkan saran dari Robert Kennedy tidak dihiraukan oleh Soekarno, konfrontasi Malaysia terus dilanjutkan. Ikeda mengharapkan adanya suatu pertemuan yang dilakukan oleh “Negara MAPHILINDO untuk melakukan musyawarah dengan konferensi tingkat tinggi Manila untuk mencapai kesetabilan, perdamaian dan

kesejahteraan bersama” (Nishihara, Masashi, 1993, 177).

Perundingan ini merupakan perundingan terakhir yang dilakukan oleh Ikeda. Akan tetapi konfrontasi Malaysia terus berlanjut.

3. Lobi Kawasima

Perundingan antara Jepang dengan Indonesia terus berlangsung maka Perdana Menteri Sato menunjuk Kawasima untuk meneruskan lobi Ikeda. Mediasi yang dilakukan Kawasima didukung oleh orang-orang yang dekat dengan Soekarno, seperti Saito Shizuo merupakan kawan lama dengan Soekarno yang terjalin pada saat dia masih memegang jabatan ketua seksi dari departemen, keduanya sudah cukup mengenal baik dapat dilihat dari seringnya kunjungan yang dilakukan oleh Saito ke istana negara untuk bertemu dengan Soekarno dan Dewi.

Dalam lawatannya Saito sering menyinggung tentang masalah yang sedang dihadapi Indonesia dengan Malaysia. Saito menawarkan bahwa mereka siap membantu untuk menyelesaikan masalah konfrontasi. Langkah-langkah yang diambil Saito untuk lebih mempererat Indonesia-Jepang dengan menggunakan jabatannya sebagai ketua salah satu Asosiasi Kebudayaan Indonesia-Jepang, untuk bisa mempererat dua kebudayaan tersebut.

Pada tahun 1964 Saito berusaha untuk menghubungkan perkumpulan kebudayaan dengan lembaga persahabatan Indonesia-Jepang, yang diketuai Dewi sejak Mei 1964” (Masashi Nishihara, 1993:182). Rencana ini diambil oleh Saito untuk memudahkan jalinan antara dia dengan Soekarno. Begitu juga dengan Kawasima datang ke

Indonesia yaitu “pada bulan April tahun 1965, Kawasima sebagai wakil Perdana Menteri Sato untuk menghadiri peringatan Konferensi Asia Afrika ke-2 (S. Ichimura, 1967, 76)”.

Dalam kunjungan ini Kawasima memiliki dua tujuan yaitu sebagai wakil negara Jepang dan keingintahuan tentang maksud dan tujuan dari konfrontasi Soekarno terhadap Malaysia. Pertemuan ini Kawasima sempat bertemu dengan Soekarno dan membahas tentang pembuatan pabrik tenaga uap yang rencana akan dibuat dipinggiran kota Jakarta.

Keesokan harinya setelah kunjungan ke Indonesia, Kawasima berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia berniat untuk bertemu dengan Perdana Menteri Rahman untuk membicarakan hasil pertemuan dengan Soekarno. Kawasima memberikan informasi dari pembicaraan pada saat di Indonesia. Rahman sendiri menerima dan menyetujui keputusan Jepang akan membentuk sebuah kelompok mediasi yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara yang diberi nama dengan komisi mediasi empat negara dan setuju akan mengadakan pertemuan Soekarno-Rahman.

Rencana pelaksanaan Komisi Empat Negara ini akan ditindak lanjuti dan akan disiapkan oleh Jepang serta apa saja yang diperlukan untuk memfasilitasi mediasi ini. Jepang selaku prakarsa pembentukan badan penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia, bertanggungjawab tentang semua pengaturan jadwal pertemuan dan agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Kawasima selaku ketua dari komisi Empat Negara benar-benar serius untuk

menjalankan perundingan ini. Langkah yang diambil dari Kawasima begitu aktif dan berusaha untuk tetap berhubungan dengan Indonesia-Malaysia.

Setelah pertemuan dengan Rahman, Kawasima berangkat kembali ke Bangkok untuk mencari dukungan-dukungan kepada para pemimpin Thailand. "Di Bangkok Kawasima juga berembuk dengan duta besar-duta besar Jepang untuk Indonesia, Malaysia, Muangthai: berturut-turut, Saito Shizuo, Kai Fumihiko dan Kasuya Takao, untuk menyusun rencana-rencana sementara untuk komisi itu" (S. Ichimura, 1967 : 81-82). Pertemuan tersebut membahas rencana apa saja yang akan dilakukan oleh komisi penengah empat negara, maka perlunya koordinasi antar pemimpin perwakilan Jepang di setiap negara tersebut.

Duta Jepang untuk Indonesia, Saito Saito langsung bertemu dengan Soekarno dan menyampaikan hasil pertemuan di Bangkok serta hasil pembicaraan Kawasima-Rahman saat lawatannya ke Kuala Lumpur. Keputusan yang diambil oleh Jepang adalah "untuk mengundang secara resmi agar datang ke Tokyo untuk bertemu dengan Rahman. Kesan yang diperoleh ialah bahwa Soekarno menerima undangan itu" (S. Ichimura, 1967: 82). Tujuan dalam pertemuan ini untuk membahas masalah konfrontasi dan merupakan hasil dari kesepakatan komisi penengah empat negara.

Usaha kedua Kawasima melihat ada kesempatan untuk menjalankan rencana untuk mempertemukan Soekarno-Rahman pada acara Konferensi Asia-Afrika. Jepang mendesak pula agar Malaysia

diundang ke konferensi itu, dan ini dengan sendirinya tidak disetujui Indonesia" (S. Ichimura, 1967: 83). Sontak respon Indonesia sangat tidak senang atas keputusan yang diambil Jepang khususnya Kawasima. Keputusan yang diambil Kawasima dianggap keputusan sebelah pihak. Sikap yang diberikan Indonesia terhadap Jepang tentang meminta Malaysia diundang dalam Konferensi Asia-Afrika. Indonesia menentang dan menolak atas permintaan Jepang tersebut. Jadi usaha yang dilakukan Kawasima pun gagal kembali.

Usaha Kawasima ketiga sebagai mediator, dalam kesempatan ini mengalami kesulitan bila dibandingkan dengan perundingan pertama dan kedua. Kawasima tidak mendapat respon positif dari para tokoh politik Indonesia dan Soekarno, sikap ini berbuntut dari permintaan Jepang untuk diundang dalam Konferensi Asia-Afrika. Dalam pertemuan tersebut Kawasima membujuk kepada Soekarno untuk dapat melakukan perundingan kembali bersama Rahman. Sikap Soekarno tetap tidak mau membicarakan kembali dan bertemu dengan Rahman tentang Konfrontasi.

Dengan melihat itu Kawasima harus mencari jalan keluar untuk bisa meluluhkan hatinya Soekarno. Salah satu cara yang diambil oleh Kawasima yaitu

"Senjata lain yang masih dimiliki Kawasima untuk membujuk Indonesia tinggal satu: yaitu dengan menawarkan lebih banyak lagi bantuan ekonomi yang memang sangat diperlukan. Dia berhasil mengubah pikiran Sukarno dengan

menagguhkan pembayar sebesar \$ 37 juta untuk impor barang, sehingga komitmen Jepang tahun itu untuk Indonesia mencapai \$ 72 juta, jauh lebih besar dari pada komitmennya untuk negara lain mana pun” (Masashi Nishihara, 1993: 188).

Dengan cara ini sikap Soekarno melunak dan dapat diajak berunding kembali untuk membahas Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Akan tetapi hasil yang diperoleh dari hasil perundingan tidak banyak. Perundingan yang terakhir dari Kawasima tidak banyak perubahan dengan keadaan yang sedang berlangsung, karena politik konfrontasi Indonesia juga tetap berjalan sesuai dengan keinginan dari Soekarno.

4. Lobi Shirahata Tomoyoshi

Setelah peristiwa Gestapu Jepang coba menghubungi Indonesia dan Jepang menawarkan kembali untuk melanjutkan kembali mediasi yang tertunda akibat Gestapu. “pada 12 Maret 1966 Jepang dapat mengumumkan bahwa kebijakan terhadap Indonesia tetap tidak akan berubah, dan baru pada awal Mei Jepang menawarkan kembali untuk melakukan mediasi dalam masalah Malaysia” (Masashi Nishihara, 1993: 189). Perwakilan Jepang yang menggantikan Kawasima yaitu Shirahata sebagai mediator selanjutnya dan mediator yang terakhir.

Usaha yang dilakukan Shirahata dengan berkunjung ke Indonesia dan menghubungi sahabatnya yaitu Adam Malik. Shirahata bertanya kepada Adam Malik tentang keadaan Indonesia saat ini. Ujar kata Adam

Malik keadaan saat ini belum tepat untuk melakukan mediasi. Meski dilanjutkan pasti pendukung Soekarno pasti menghalang-halangi untuk penyelenggaraan mediasi dengan Malaysia. Sebanarnya dia bersedia untuk melakukan mediasi dengan Malaysia bahwa Indonesia saat ini sudah terbuka untuk semua termasuk buat Malaysia. Keseriusan dari ucapan Adam Malik,

“untuk meyakinkan Malaysia akan kesungguhan Indonesia. Adam Malik meminta pada Shirahata kalau dia bersedia pergi ke Kuala Lumpur. Shirahata menyetujui ini dan menyarankan agar Kai Fumihiko turut serta. Shirahata kemudian mengusulkan agar Kai berangkat secara diam-diam ke Bangkok pada akhir April” (S. Ichamura, 1976: 92).

Shirahata melihat keinginan Adam Malik tentang keinginan Indonesia berdamai dengan Malaysia ini benar-benar serius. Shirahata dan Kai berkoordinasi mengatur apa saja yang harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan Masalah Konfrontasi Indonesia Malaysia. Pergerakan yang dilakukan Shirahata dan Kai karuh hati-hati dan bersembunyi-sembunyi agar pendukung Soekarno tidak mengetahui. Adam Malik dan Shirahata berunding tentang penyelesaian konfrontasi serta Kai berusaha berbicara kepada Tun Razak.

Bahwa sikap Indonesia tulus untuk berdamai dan berusaha menyelesaikan Konfrontasi yang selama ini telah terjadi terhadap Malaysia.

“Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Razak, mengumumkan pada tanggal

8 Mei bahwa Malaysia bersiap untuk mengadakan pembicaraan perdamaian dengan Indonesia tanpa bantuan pihak ketiga. Adam Malik sepakat dengan Razak, dengan mengatakan pada tanggal 12 Mei bahwa Indonesia juga tidak memerlukan pihak ketiga” (Masashi Nishihara, 1993: 191).

Keputusan yang diambil dari kedua perwakilan negara yang bersengketa maka secara tidak langsung mengakhiri perundingan yang dilakukan oleh Jepang.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan data diperoleh maka usaha Jepang dalam penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah: Jepang melakukan mediasi dengan menunjuk empat perwakilannya selama proses mediasi Konfrontasi Indonesia-Malaysia yaitu:

1. Ohiro Masayoshiro

Langkah pertama pemerintah Jepang untuk ikut dalam masalah Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Dia melihat peluang untuk Jepang bisa berkecimpung lagi diperpolitikan dunia. Langkah-langkah yang diambil oleh Ohiro pun bersifat fleksibel. Ohiro harus tahu menghadapi kedua pemimpin negara tersebut. Khususnya dengan sikap Soekarno yang masih bersikap keras akan melanjutkan aksinya dengan Mengganyang Malaysia.

Langkah yang diambil Ohiro dengan mengundang Perdana Menteri Indonesia Subandrio untuk bertemu dengannya. Dalam perbincangan tersebut Ohiro meminta kepada Subandrio untuk mengajak

Soekarno datang ke Tokyo untuk bertemu dengan Tunku Abdur Rahman. Ajakan dari Ohiro ditanggapi dengan baik oleh kedua belah pihak. Pertemuan antara Soekarno-Rahman akhirnya bisa dilaksanakan di Tokyo.

2. Lobi Ikeda

Tindakan yang diambil oleh Ikeda untuk berkunjung ke Indonesia sangatlah baik. Dalam kunjungan Ikeda sangat senang akibat penyambutan oleh Soekarno. Langkah-langkah yang diambil oleh Ikeda dengan berbica dengan Soekarno tentang berkibarnya Bendera Merah Putih di Keduataan Inggris. Ikeda menyarankan untuk bendera itu diturunkan. Maksud Ikeda untuk menurunkan ketegangan yang sedang terjadi antara Indonesia-Inggris-Malaysia. Soekarno akhirnya mendengarkan Saran Ikeda untuk menurunkan bendera tersebut. Akan tetapi penurunan tersebut tidak bisa dilakukan pada siang hari. Soekarno memerintahkan dan dilakukan pada malam hari untuk menghindari demonstran.

Perundingan selanjutnya oleh Ikeda adalah pada saat kunjungan ke Indonesia, Ikeda disitu bertemu secara tertutup untuk membicarakan penyelesaian masalah konfrontasi. Ikeda mengajak Soekarno untuk duduk bersama dengan Rahman untuk membicarakan masalah Kalimantan utara. Perundingan yang dilakukan Ikeda pun mengalami kegagalan lantaran kedua belah pihak selalu berubah dalam keputusannya.

3. Lobi Kawasima

Lobi yang dilakukan Kawasima merupakan negosiasi lanjutan yang dilakukan

setelah itu, usaha yang dilakukan oleh Kawasima beberapa kali melakukan perundingan dengan pihak Indonesia dan perundingan dengan Malaysia.

Perundingan pertama yang dilakukan Kawasima mengalami kegagalan dilantarkan kesibukan yang dilakukan oleh Soekarno. Pada saat itu Soekarno memperingati hari buruh. Perundingan kedua dilakukan Kawasima dalam acara Konferensi Asia Afrika. Jepang meminta ke Indonesia untuk mengikut sertakan Malaysia dalam pertemuan tersebut. Tanggapan yang diberikan Indonesia atas permintaan Jepang yaitu menolak Malaysia dalam keikutsertaan di KAA. Perundingan ketiga dilakukan oleh Kawasima pada saat diundang dalam acara 17 Agustus 1965. Perundingan dilakukan setelah acara itu Kawasima menawarkan kembali untuk melakukan perundingan lagi dengan Rahman, tetapi respon yang diberikan Soekarno begitu dingin atas permintaan itu. Perundingan yang ditawarkan oleh Kawasima pun gagal.

4. Lobi Shirahata Tomoyoshi

Usaha yang dilakukan oleh Shirahata tidak banyak, perundingan terakhir oleh Jepang dalam penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia. Shirahata memantau kondisi Indonesia setelah Gestapu apa bisa melakukan melanjutkan mediasi kembali.

Apabila perundingan akan dilanjutkan harus secara diam-diam. Adam Malik ingin datang ke Kuala Lumpur untuk membicarakan penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia. Shirahata menghubungi Kai untuk ikut serta dalam menjalankan perundingan ini bisa berjalan. Kai

bertugas untuk menyampaikan dan berbicara dengan Razak tentang niatan Indonesia untuk menyelesaikan Konfrontasi itu. Dalam keputusan akhir kedua belah pihak memutuskan tidak memerlukan pihak ketiga dalam menyelesaikan konfrontasi ini, baik Indonesia maupun Malaysia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa usaha Jepang dalam penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963-1966 yaitu: Jepang melakukan mediasi dalam usahanya menyelesaikan konfrontasi Indonesia-Malaysia, Jepang membentuk suatu kelompok yang dikenal dengan Komisi Penengah Empat Negara terdiri dari Jepang, Thailand, Kamboja dan Filipina. Tujuan dibentuknya komisi ini untuk membantu Jepang dalam penyelesaian konfrontasi Indonesia-Malaysia, Jepang membantu perekonomian Indonesia dengan cara memberikan pinjaman kredit dan investasi modal di Indonesia serta menunda pembayaran hutang Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muhaimin, Yahya. 1982. *Perkembangan Militer Dalam Politik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- B. Srijanto, John. 2010. *Ganyang Malaysia Politik Konfrontasi Bung Karno*. Yogyakarta. Interpre Book.
- Camp Counseling. 2011. *model-model analisis data*

- kualitatif*.<http://bkpemula.wordpress.com/2011/12/04/model-model-analisis-data-kualitatif/>diakses 6 juni 2013
- Darmawan. 2008. *Sukarno Memilih Tenggelam Agar Suharto Muncul*. Jakarta. Hikayat Dunia.
- Effendi, Sofian. 1998. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Ichimura, s. 1967. *Indonesia Masalah Peristiwa Bunga Rampai*. Jakarta. Gramedia
- Koentjoroningrat. 1986. *Metode-metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Gramedia
- Koentjaraningrat. 1997. *Pengantar Antropologi*. Jakarta. Rineka Cipta
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, Handari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Pers.
- Nishihara, Masashi, 1993. *Sukarno Ratna Sari Dewi dan Pampasan Perang*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.
- Notosusanto, Nugroho. 1964. *Hakikat Sejarah Dan Metode Sejarah Pusat*. Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata
- Notosusanto, Nugroho. 1983. *Metode-metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gramedia
- Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta
- Tek Tjeng, Lie. 1983. *studi wilayah umumnya asia tenggara pada khususnya*. Bandung. Alumni